



**DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010-2016**

SKRIPSI

Oleh

**Triana Wulandari
NIM 140810101071**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010-2016**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Triana Wulandari
NIM 140810101071**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Sri Mulyani dan Almarhum Ayahanda Marsam tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, materi, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis, yang tiada mungkin dapat dibalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan;
2. Guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang
di jalan Allah hingga pulang.
(H.R.Tirmidzi)^{*}

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle.
The other is as though everything is a miracle.
(Albert Einstein)^{**)}

I will fight until the end and never give up.
(Merry Riana)^{***)}

^{*}Esa Putra Tanjung,2012. Hadist Menuntut Ilmu dan Penjelasanannya. <https://waktuku.com/hadist-menuntut-ilmu/>. [Diakses pada 11 April 2018].

^{**)}Alice Calaprice. 2011. The Ultimate Quotable Einstein. Jerussalem :Princeton University Press

^{***)}Clairine Clay. 2015. Ketawa Cantik Ala Miss Meme. Ciganjur: Enter Media

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triana Wulandari

NIM : 140810101071

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 April 2018

Yang menyatakan,

Triana Wulandari
NIM 140810101071

SKRIPSI

**DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010-2016**

Oleh

Triana Wulandari
NIM 140810101071

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E.,M.P.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun
2010-2016
Nama Mahasiswa : Triana Wulandari
NIM : 140810101071
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 4 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si.
NIP. 196004121987021001

Dr. Herman Cahyo Diartho, SE., M.P
NIP. 197207131999031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010-2016**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Triana Wulandari

NIM : 140810101071

Jurusan : Ilmu Ekonomi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:
4 Mei 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
gunamemperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc. (.....)
NIP.19560831 198403 1 002
2. Sekertaris : Drs. Badjuri, M.E. (.....)
NIP.19531225 198403 1 002
3. Anggota : Dr. Riniati, M.P. (.....)
NIP.19600430 198603 2 001

Foto 4 x 6
Warna

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA.
NIP. 197107271995121 001

Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

Triana Wulandari

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin yang besar di antara provinsi lainnya yang berada di Pulau Jawa. Salah satu penyebabnya adalah program Keluarga Berencana (KB) yang kurang terealisasi, akibatnya beban tanggungan keluarga pun menjadi bertambah. BPS menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka kemiskinan absolut tertinggi. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran dan upah minimum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan data *time series* dari tahun 2010 sampai dengan 2016 dan data *cross section* dari 38 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Hasil regresi data panel menunjukkan secara simultan bahwa variabel PDRB, Pengangguran dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa PDRB dan pengangguran berpengaruh signifikan sedangkan upah minimum memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci: Kemiskinan, PDRB, Pengangguran, Upah Minimum.

Determinants of Poverty in East Java Province 2010-2016

Triana Wulandari

Department of Economics, Economics and Business Faculty, Jember University

ABSTRACT

East Java has a large number of poor people among other provinces located in Java. One reason is the family planning program that is less realization, consequently the burden of family dependents became increasing. BPS states that East Java is the province with the highest absolute poverty rates. Factors affecting poverty are Gross Regional Domestic Product (GRDP), unemployment and minimum wage. The purpose of this research were to know how big influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), unemployment, minimum wage to poverty in East Java Province. The method of analysis used in this research is panel data regression with time series data from 2010 to 2016 and cross section data from 38 cities / regencies in East Java Province. The result of panel data regression showed that simultaneously that the variable of GRDP, Unemployment and minimum wage have significant effect to poverty in East Java Province. The result of partial test analysis showed that GRDP and unemployment have significant effect while minimum wage has an insignificant influence to poverty in East Java Province.

Keyword: *Poverty, GRDP, Unemployment, Minimum Wage.*

RINGKASAN

Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016; Triana Wulandari, 140810101071. 2018; Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, maupun struktural. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Cholili, 2014).

Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin yang besar di antara provinsi lainnya yang berada di Pulau Jawa. BPS menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka kemiskinan absolut tertinggi. Provinsi ini harus bekerja keras untuk mengurangi tingkat kemiskinan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara optimal.

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Upah minimum juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Upah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja, adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran tenaga kerja, sesuai dengan hukum

penawaran bahwa tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan.

Hasil regresi data panel menunjukkan secara simultan bahwa variabel PDRB, Pengangguran dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa PDRB dan pengangguran berpengaruh signifikan sedangkan upah minimum memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan orang miskin tidak ditentukan oleh upah minimum tetapi miskin tidaknya seseorang lebih disebabkan oleh kesempatan orang dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan yang kedua ditentukan oleh *style* atau gaya hidup serta pola konsumtif orang tersebut.

Penelitian ini memberikan saran agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan pemeratakan hasil dari pertumbuhan ekonomi, agar dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat baik kaya maupun miskin. Pemerataan ini dapat dimulai dengan cara membangun infrastruktur terutama di daerah pedesaan. Pemerintah perlu memperluas sektor informal seperti mengembangkan industri rumah tangga. Memberikan pinjaman lunak tanpa agunan untuk modal kerja usaha kecil. Diharapkan penetapan upah minimum memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta mendekati KHM (Kebutuhan Hidup Minimum).

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016*” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E.,M.P. selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dra. Anifatul Hanim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Dr. Sebastiana Viphindaratin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Ibunda Sri Mulyani dan Almarhum Ayahanda Marsam tercinta yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa;
8. Wantin Fatmawati dan Andi Murpi selaku kakak penulis yang telah memberi dukungan dan bantuan;
9. Sahabat-sahabatku Wardatul Luthfiyana, Devira Nuarisa, Hendra Hadi, Tiza Desy Kurnia, Asri Fortune Aziza dan Ferisma Yudha yang selalu menemani, mendukung dan memberi semangat;
10. Rekan-rekan terbaik penulis di Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014 Ma'ruf Hanuraga, Nurma Kamelia, Halimatus Putrya, Razan Febri, Dea Magdalena, Gita Triyadan Bagus Suryo terimakasih atas motivasinya;
11. Rekan-rekan KKN 29 Desa Menampu Kec. Gumukmas Kab. Jember, Fadiah Ulfa, Syahrul Milada, Kurnia Juana, Handita, Nur Kholilah, Danar Ilma, Rosi Indra, Bintang Yunanda dan Adang Kurnia, terimakasih atas pengalaman baru dan motivasinya;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 17 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Paradigma Sosial Demokrasi	11
2.1.2 Teori Struktural.....	12
2.1.3 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	13
2.1.4 Konsep Kemiskinan.....	15

2.1.5 PDRB dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan	19
2.1.6 Pengangguran dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan	21
2.1.7 Upah Minimum dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan....	23
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Konseptual	32
2.4 Hipotesis	34
BAB 3. METODE PENELITIAN	35
3.1 Rancangan Penelitian	35
3.1.1 Jenis Penelitian	35
3.1.2 Unit Analisis	35
3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
3.1.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.2 Metode Analisis Data.....	36
3.2.1 Analisis Regresi Data Panel.....	38
3.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.2.3 Uji Statistik	41
3.3 Definisi Operasional	43
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum	45
4.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah Jawa Timur ..	45
4.1.2 Kondisi Penduduk Jawa Timur	48
4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian	48
4.2.1 Kondisi Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur	48
4.2.2 Kondisi Produk Domestik Regional (PDRB) di Jawa Timur.....	50
4.2.3 Kondisi Pengangguran di Jawa Timur	51
4.2.4 Kondisi Tingkat Upah Minimum di Jawa Timur.....	52
4.3 Hasil Penelitian.....	54
4.3.1 Pemilihan Model Estimasi Data Panel.....	54
4.3.2 Analisis Regresi Data Panel.....	58

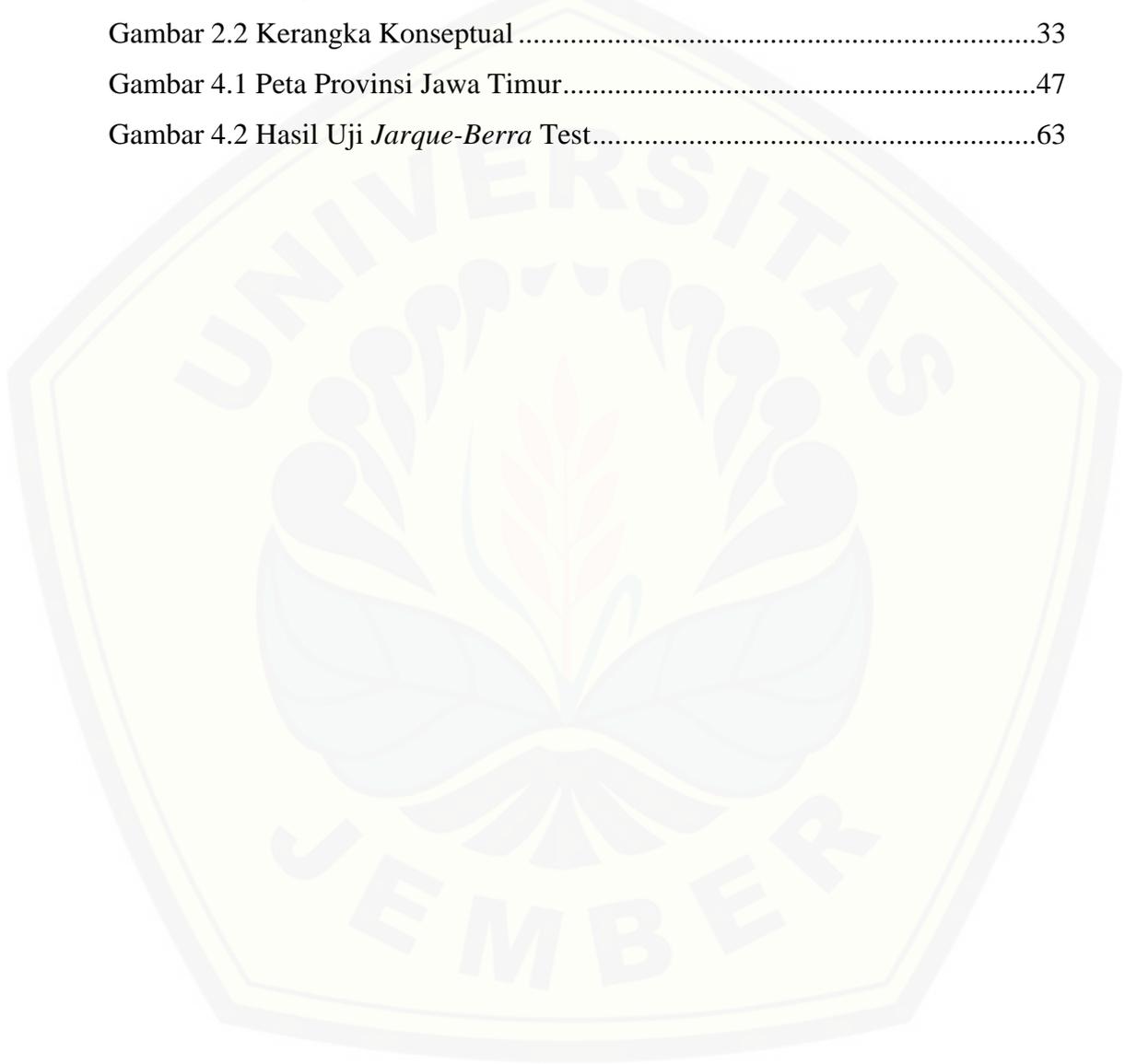
4.3.3 Uji Statistik.....	60
4.3.4 Uji Asumsi Klasik.....	63
4.4 Pembahasan	63
4.4.1 Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan.....	63
4.4.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan	65
4.4.3 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan.....	66
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2010-2016.....	3
Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2016	4
Tabel 1.3 Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur 2010-2016.....	6
Tabel 1.4 Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Timur 2010-2016	8
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Wilayah Administratif Jawa Timur.....	47
Tabel 4.2 Proyeksi Penduduk Jawa Timur Tahun 2010-2016 (Juta Jiwa).....	48
Tabel 4.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur	49
Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Jawa Timur Tahun 2010-2016 (Persen)	50
Tabel 4.5 TPT dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur Tahun 2010-2016 (Persen)	52
Tabel 4.6 Presentase Kenaikan Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016.....	54
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Chow</i>	55
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Hausman Test</i>	56
Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan <i>Fixed Effect</i>	57
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	58
Tabel 4.11 Hasil Uji T.....	59
Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi	60
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas	61
Tabel 4.14 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	61
Tabel 4.15 Hasil Uji <i>Jarque-Berra Test</i>	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan	14
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Timur.....	47
Gambar 4.2 Hasil Uji <i>Jarque-Berra</i> Test.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A: Data Jumlah Penduduk Miskin (Y), PDRB (X1), Pengangguran (X2) dan Upah Minimum (X3)	75
Lampiran B: Uji <i>Chow</i>	82
Lampiran C: Uji <i>Hausman</i>	83
Lampiran D: <i>Estimasi Fixed Effect</i>	84
Lampiran E: Uji Normalitas	85
Lampiran F: Uji Multikolinieritas	85
Lampiran G: Uji Autokorelasi	86
Lampiran H: Uji Heterokedastisitas	87

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang menarik karena di dalamnya terdapat banyak dinamika, baik secara mikro maupun secara makro. Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, oleh karena itu diperlukan indikator sebagai tolak ukur terjadinya pembangunan. Suatu negara akan dikatakan sukses dalam pembangunan ekonomi jika telah menyelesaikan tiga masalah dalam pembangunan. Pertama, jumlah kemiskinan yang terus meningkat, kedua, distribusi pendapatan yang semakin memburuk, ketiga, lapangan pekerjaan yang kurang variatif sehingga tidak mampu menyerap para pencari kerja (Kuncoro, 2010).

Pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa kemiskinan menjadi salah satu masalah yang harus diatasi dalam konteks pembangunan ekonomi sesuai pandangan ekonomi baru. Keberhasilan suatu perekonomian tidak hanya diukur melalui peningkatan PDB, melainkan juga kemampuan suatu negara dalam mengatasi masalah kemiskinan (Todaro, 2000).

Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, maupun struktural. Kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari 2 sisi: Pertama, kemiskinan absolut, dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan

ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Hapsoro, 2013).

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Kemiskinan terus menjadi masalah utama sepanjang sejarah Indonesia, karena selama ini upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah masih belum dilaksanakan dengan maksimal, dan juga masih banyak program yang belum tepat sasaran. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Cholili, 2014).

Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses pada pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan (Kumalasari, 2011).

Jawa Timur merupakan sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 47,799.75 km² atau setara dengan 2.498 km² luas wilayah di Indonesia, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat (Anonim, 2011). Jawa Timur juga memiliki jumlah penduduk miskin yang besar di antara provinsi lainnya yang berada di Pulau Jawa. Provinsi ini harus bekerja keras untuk mengurangi tingkat kemiskinan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat

memberikan manfaat secara optimal. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2010-2016

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2010	312.20	4 773.70	5 369.20	577.30	5 529.30	758.20
2011	363.42	4 648.63	5 107.36	560.88	5 356.21	690.49
2012	366.80	4 477.50	4 977.40	562.10	5 071.00	652.80
2013	375.70	4 382.65	4 704.87	535.18	4 865.82	682.71
2014	412.79	4 238.96	4 561.82	532.59	4 748.42	649.19
2015	368.67	4 485.65	4 505.78	485.56	4 775.97	690.67
2016	385.84	4 168.11	4 493.75	488.83	4 638.53	657.74

Sumber: BPS 2017

Dari Tabel 1.1 kita dapat melihat jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa, dan Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama. Hal ini berkaitan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang mencatat 237,6 juta jiwa sebagai bukti pertumbuhan penduduk Indonesia 5 tahun lebih cepat dari proyeksi BPS. Karena proyeksi semula, tahun 2010 baru berjumlah 234,2 juta jiwa dan tahun 2015 berkisar 237,8 juta jiwa. Kenyataannya, tahun 2010 penduduk Indonesia sudah mencapai 237,6 juta jiwa. Meledaknya jumlah penduduk tersebut tersebar di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa (yang berlokasi di bagian barat Indonesia dengan populasi padat).

Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa lainnya, terkena imbasnya. Salah satu penyebabnya adalah program Keluarga Berencana (KB) yang kurang terealisasi, akibatnya beban tanggungan keluarga pun menjadi bertambah. BPS menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka kemiskinan absolut tertinggi. Sehingga yang awalnya masyarakat berada di atas atau di sekitar garis kemiskinan, kemudian menjadi bergeser ke bawah garis kemiskinan. Hal ini yang menyebabkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur menempati urutan pertama.

Program-program anti kemiskinan yang digulirkan oleh Pemerintah seperti BLT, PNPM Mandiri, dan lain sebagainya membuat jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.

Meskipun jumlah penduduk miskin secara umum menurun hingga tahun 2016, namun jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih tergolong besar.

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessery condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB ialah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Sehingga dapat dikatakan, semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Hapsoro, 2013).

Gambaran umum kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data fundamental makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didorong oleh tiga sektor utama, antara lain: pertanian, industri manufaktur serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2010-2016

No.	Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)
1	2010	990.648
2	2011	1.054.401
3	2012	1.124.464
4	2013	1.192.789
5	2014	1.262.684
6	2015	1.331.394
7	2016	1.405.236

Sumber: BPS 2017

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami tren yang meningkat, meski mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut sebesar 5,97% lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5,90%. Provinsi Jawa

Timur memiliki posisi strategis di bidang industri karena terletak di antara Jawa Tengah dan Bali sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri dan perdagangan (Bappenas, 2015).

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur memiliki pola yang hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, dimana siklus bisnis yang ada di tingkat nasional juga memberikan efek terhadap perekonomian Jawa Timur. Walaupun seluruh wilayah di Indonesia mengalami tren penurunan pertumbuhan tinggi, namun Jawa Timur masih mempertahankan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi mencapai 5,9%. Hal ini menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur, dan juga menunjukkan kinerja rata-rata Jawa Timur berkembang lebih pesat dari rata-rata provinsi lainnya.

Tren pelemahan ekonomi nasional berimplikasi pada menurunnya geliat ekonomi dan terpuruknya kinerja sektor andalan di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan PDRB ini selanjutnya diharapkan akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan keseluruhan sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Maka untuk mempercepat proses penurunan tingkat kemiskinan tersebut, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal itu akan

mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnyatingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu masalah kemiskinan (Sadono Sukirno,2002).

Pengangguran dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja.Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.Adanya pengangguran yang semakin tinggi akan menjadi masalah penting yang harus diselesaikan, karena adanya pengangguran yang tinggi akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat (Cholili, 2014).

Tabel 1.3 Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur 2010-2016

No.	Tahun	Pengangguran (%)
1	2010	4.25
2	2011	5.33
3	2012	4.09
4	2013	4.30
5	2014	4.19
6	2015	4.47
7	2016	4.21

Sumber: BPS 2017

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan cenderung menurun.Tahun 2015, jumlah pengangguran di provinsi Jawa Timur ini tercatat 906.904 orang. Jumlah ini turunmenjadi 839.280 orang (4,21%) di 2016.Penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur yang terus meningkat. Apabila ada pertumbuhan ekonomi, maka tentunya penyerapan tenaga kerja juga ada. Apabila penyerapan tenaga kerja semakin besar, tentu tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, akibatnya pertumbuhan ekonomi ini menurunkan jumlah pengangguran yang ada di Jawa Timur.

Namun di sisi lain, walaupun cenderung mengalami penurunan, namun jumlah pengangguran juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, sedangkan pertumbuhan penduduk yang jumlahnya semakin meningkat dari tahunketahun mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan bertambahnya

jumlah tenaga kerja. Hal itu akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja dari pada permintaannya, sehingga akan berakibat kenaikan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur.

Upah minimum juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Upah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja, adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran tenaga kerja, sesuai dengan hukum penawaran bahwa tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Jika tingkat upah relatif rendah, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan menjadi sedikit. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981, upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, namun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Pada dasarnya upah minimum terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, namun dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokok yang tidak termasuk tunjangan, hal ini menyebabkan sering terjadinya kontroversi antara pengusaha dan pekerja. Dasar penetapan UMP terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Tujuan ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan terbebas dari kemiskinan.

Tabel 1.4 Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Timur 2010-2016

No.	Tahun	Upah Minimum
1	2010	630.000
2	2011	705.000
3	2012	745.000
4	2013	866.250
5	2014	1.000.000
6	2015	1.010.000
7	2016	1.273.490

Sumber: BPS 2016

Pada Tabel 1.4 menunjukkan besarnya upah minimum provinsi dalam satuan rupiah di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Upah minimum pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun kenaikan upah minimum pada kondisi pasar tenaga kerja yang bersifat *labor surplus* akan memperbanyak jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena perusahaan harus meningkatkan upah yang diberikan kepada para pekerjanya sehingga biaya perusahaan akan meningkat. Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat inflasi yang tinggi, kenaikan biaya ini memaksa perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kenaikan biaya akibat kenaikan upah lebih besar daripada kenaikan keuntungan dari produk output. Akhirnya penduduk terpaksa bekerja di sektor informal dengan tingkat upah riil yang rendah, yang nantinya dapat menurunkan kesejahteraan sehingga menyebabkan kemiskinan meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kemiskinan merupakan tolak ukur kesejahteraan suatu daerah. Oleh karena itu, kami ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel makroekonomi yang telah dijelaskan di atas yang antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan upah minimum untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Seberapa besar pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian kali ini yakni :

1. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan mengenai kemiskinan.
 - b. Diharapkan dijadikan bahan literatur dan studi pustaka bagi dunia pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dari ilmu ekonomi khususnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dijadikan tambahan informasi, referensi dan kajian lebih lanjut untuk penelitian dalam bidang yang berhubungan dengan kemiskinan.
- b. Diharapkan dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang akan mengadakan penelitian yang sama.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Secara umum teori diartikan sebagai serangkaian bagian, definisi atau dalil yang saling berhubungan dan menghadirkan sebuah pandangan sistematis tentang fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala yang terjadi. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori.

2.1.1 Teori Paradigma Sosial Demokrasi

Teori ini tidak melihat kemiskinan sebagai akibat dari persoalan individu, melainkan lebih melihat dari persoalan struktural. Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling selektif (Febriana, 2010).

Pendekatan dari teori ini menekankan pada kesetaraan sebagai syarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Disinilah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Febriana, 2010).

Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini

kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, akan dapat meningkatkan kebebasan, hal ini dikarenakan tersedianya penghasilan dasar sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya, dan sebaliknya ketiadaan penghasilan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (Febriana, 2010).

Kelemahan teori tersebut adalah adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan itu sendiri tergantung pada kapabilitas kelompok miskin. Penggunaan kemiskinan relatif dalam pendekatan ini juga lebih menyulitkan dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh kelompok miskin. Hal ini dikarenakan kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan minimal yang harus dicapai tapi lebih pada rata-rata kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian pendekatan ini membuka dimensi lain dari penyebab kemiskinan yaitu pada struktur dan institusi, yang telah menyebabkan tertutupnya akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Sehingga melalui pendekatan ini dapat dilihat bahwa akar permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar pada kemampuan individu tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan (Febriana, 2010).

2.1.2 Teori Struktural

Teori struktural memandang bahwa hambatan-hambatan struktural yang sistematis telah menciptakan ketidaksamaan dalam kesempatan, dan kelanjutannya adalah penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis. Kemiskinan akibat dari super struktur yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya. Struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya kreasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan

serta terpinggirkannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kemiskinan, dalam realitasnya selalu dilihat dari sudut ekonomi, dimana batasan kemiskinan adalah suatu kondisi di mana orang tidak memiliki harta benda atau mempunyai pendapatan di bawah batasan nominal tertentu.

Beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab kemiskinan majemuk meliputi tiga aspek yaitu :

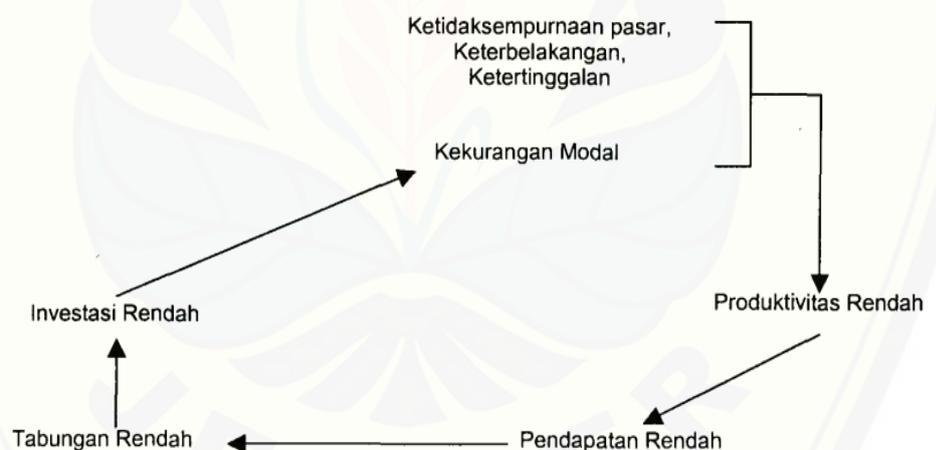
1. Kelembagaan: rakyat miskin tidak punya akses ke pembuat keputusan dan kebijakan, sedangkan kelembagaan yang ada tidak pernah menjangkau atau menyalurkan aspirasi yang muncul dari bawah, dan setiap kebutuhan rakyat miskin sudah didefinisikan dari atas oleh kelembagaan yang ada, sehingga kemiskinan tidak dapat terselesaikan.
2. Regulasi: kebijakan pemerintah yang mengutamakan kepentingan ekonomi. Kebijakan ekonomi dalam investasi modal pada sektor-sektor industri yang tidak berbasis pada potensi rakyat menutup kesempatan masyarakat untuk mengembangkan potensinya dan menjadi akar proses pemiskinan.
3. Good governance: tidak adanya transparansi dan keterbukaan pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan kebijakan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Segala bentuk regulasi diputuskan oleh lembaga-lembaga pembuat kebijakan tanpa mengikutkan para pelaku yang terlibat dan tidak memahami aspirasi rakyat miskin sehingga kebijakan yang muncul tidak mendukung rakyat miskin.

2.1.3 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara khususnya negara berkembang mengalami banyak masalah untuk mencapai masalah pembangunan yang lebih tinggi. Menurut ahli ekonomi pembangunan, lingkaran setan kemiskinan yang tidak berujung pangkal mengatakan bahwa penduduk pedesaan terperangkap dalam lingkaran tersebut. Lingkaran tersebut mencakup pendapatan yang rendah, tabungan yang rendah, dan produktivitas yang rendah juga. Oleh karena itu lingkaran kemiskinan tersebut

perlu ditinjau dari sistem sosial masyarakat secara keseluruhan dalam masyarakat tersebut. Sistem sosial yang dimaksud adalah hubungan antara faktor-faktor yang meliputi sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi masalah kehidupan dan bekerja, birokrasi pemerintah, pola pertalian keluarga, agama dan adat istiadat di lingkungan mereka.

Menurut Nurkse (1953) penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan juga kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi (Kuncoro, 1997:132).



Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (Sumber: Kuncoro, 1997:132)

Gambar Lingkaran setan kemiskinan tersebut dapat juga diilustrasikan sebagai berikut :

- a. Karena miskin, seseorang akan memiliki pendapatan yang kecil. Karena pendapatannya kecil, daya beli informasi dan pengetahuannya juga kecil. Daya beli pengetahuan dan informasi yang rendah ini, akan menyebabkan

masyarakat yang miskin memiliki pengetahuan yang kurang. Pengetahuan yang kurang, akan menyebabkan produktivitas seseorang menjadi kecil. Karena produktivitasnya yang kecil inilah yang membuat masyarakat akan jatuh miskin lagi.

- b. Karena miskin, seseorang hanya akan memiliki tabungan yang kecil. Tabungan yang kecil, akan membuat kepemilikan modal seseorang menjadi kecil pula. Kepemilikan modal yang kecil tersebut akan mengakibatkan produksinya rendah serta pendapatannya kecil. Karena pendapatannya kecil, ia akan jatuh miskin lagi.
- c. Karena miskin, seseorang hanya akan memiliki kemampuan konsumsi yang rendah. Kemampuan konsumsi yang rendah ini akan membuat seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan pangannya secara layak. Hal ini juga akan berdampak pada buruknya status gizi seseorang. Seseorang dengan status gizi yang buruk akan memiliki produktivitas kerja yang buruk pula. Dari rendahnya produktivitas inilah, produksinya juga akan rendah, dan sekali lagi ia akan jatuh miskin.

2.1.4 Konsep Kemiskinan

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Friedmann (1979:101), menyatakan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakseimbangan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau *assets* (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber- sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna.

Menurut World Bank, dalam definisi kemiskinan adalah: *"The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other"*. Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Chriswardani Suryawati, 2005:122). Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000:107) sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal, penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan

ketertidaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali terpaksa menjalankanyang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan.
2. Kemiskinan Relatif, kondisi miskin yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpanganpendapatan atau ketimpangan kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya disebut dengan istilah daerah tertinggal.
3. Kemiskinan Kultural, kondisi miskin yang terjadi sebagai akibat adanya persoalan sikap masyarakat yang umumnya berasal dari faktor budayaatau adat istiadat yang relatif tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihakluar.
4. Kemiskinan Struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negara-negara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang disebutkembali.

Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya prasarana umum (jalan raya,

listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara yang sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusunan kebijakan pembangunan (Suryawati, 2004: 123). Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang bersifat relatif terukur seperti pendapatan perkapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
- 2) Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
- 3) Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur.
- 4) Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*).

5) Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahankebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkanpelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standarkesejahteraanpada umumnya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan di atastidak memiliki sifat mutlak (absolut) untuk dijadikan kebenaran universalterutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinyakemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atashanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasi ataudiukur.

2.1.5 PDRB dan Pengaruhnya terhadap Kemiskinan

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alamyang dimilikinya.Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerahsangatbergantungkepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut.Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa (Cholili, 2014).

Adapun metode cara menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara langsung menggunakan tiga pendekatan (Tarigan, 2007:24) yaitu :

1. Menurut Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara bahan baku dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto.

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan tingkat pendapatan nasional per kapita dari aspek ekonominya. Dalam suatu wilayah regional atau daerah, kesejahteraan masyarakat diukur melalui Produk Domestik Regional bruto (PDRB) per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB per kapita tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan kualitas dari penduduk dan tenaga kerja, kapital, tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat (Wiguna, 2013).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007:23). Menurut Sadono Sukirno, (2000:77), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak

semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

2.1.6 Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Kemiskinan

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sadono Sukirno, 1999).

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

a. Pengangguran Alamiah

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak lima persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah.

b. Pengangguran Friksional

Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah: 1) Perkembangan teknologi; 2) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain; 3) Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan akibat pertumbuhan yang pesat di kawasan lain.

d. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Umumnya pengangguran

konjungtur berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul penganggurankonjungtur.

Jenis-jenis pengangguran berdasarkancirinya:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.

b. Pengangguran Tersembunyi

Adalah keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

c. Pengangguran Musiman

Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dlam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

d. Setengah Menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam golongan setengahmenganggur.

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 2004:297).

Lincolind Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu

berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Namun kadangkala terdapat juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin (Wijayanto, 2010).

2.1.7 Upah Minimum dan Pengaruhnya terhadap Kemiskinan

Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik di negara maju maupun negara berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum antara lain untuk (a) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu; (b) meningkatkan produktivitas pekerja; (c) mengembangkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003:38).

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran maupun

pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Peran pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial maka tujuan bersama dapat tercapai.

Upah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran tenaga kerja, sesuai dengan hukum penawaran bahwa tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Kemudian jika tingkat upah relatif rendah, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan menjadi sedikit. Semakin rendah tingkat upah akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran yang terjadi akibat ketidakcocokan pekerja dengan tingkat upah yang berlaku. Kemudian hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan.

Teori Upah Alam, dari David Ricardo menerangkan :

1. Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya.
2. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya (Mankiw, 2006:160).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kemiskinan sudah banyak diteliti sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan untuk menentukan metode, kasus ataupun variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu penting digunakan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Penelitian yang dilakukan saat ini berjudul Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016, membahas tentang kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, bukan merupakan penelitian yang pertama. Namun penelitian ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti pada tabel penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki kesamaan variabel dengan beberapa penelitian-penelitian terdahulu, antara lain variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran dan upah minimum, di mana variabel-variabel ini merupakan faktor yang mempengaruhi obyek penelitian tersebut. Kesamaan yang selanjutnya yaitu pemilihan alat analisis data, dimana pada penelitian ini menggunakan analisis data panel yang juga dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian saat ini dengan yang terdahulu yaitu pada tahun yang digunakan, dimana tahun penelitian sudah diperbarui menjadi 2010-2016.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penelitian ini yang pertama adalah penelitian oleh Dita Wahyu Puspita dengan judul Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kemiskinan di provinsi Jawa Tengah periode 2008 sampai 2012. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode regresi datapanel. Dalam penelitian ini pula ditemukan bahwa pengaruh pengangguran, PDRB dan jumlah atau populasi penduduk Jawa Tengah signifikan, artinya berpengaruh pada kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

Penelitian kedua oleh Sirilius Seran berjudul Determinan Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Kemiskinan Penduduk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat (kausal) antara variabel penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*), berdasarkan lima

macam model. Hasil analisis pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (R) untuk masing-masing model bersifat signifikan, nilai Signifikan F, lebih kecil dari alfa 0,05. Kesimpulan serupa juga berlaku bagi pengujian parsial, antara masing-masing variabel bebas dengan variabel tak bebas.

Selanjutnya penelitian oleh Martiyan Ramdani dengan judul Determinan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1982-2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan pengeluaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan terhadap kemiskinan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis ekonometrika yaitu regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Penelitian oleh Ach. Samsul Rizal yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jember Tahun 1998-2012. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana dua variabel independen (PDRB dan pengangguran) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil analisis regresi linear berganda dengan alat *SPSS* menjelaskan bahwa variabel PDRB dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember. Sementara secara parsial PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember, dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember. Dengan ini menjelaskan bahwa pengangguran tidak selalu memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember.

Penelitian oleh Candra Mustika yang berjudul Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penduduk, pertumbuhan ekonomi serta jumlah penduduk miskin di Indonesia kurun waktu 1990-2008. Metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Jumlah penduduk miskin cenderung berfluktuasi dan berdasarkan indeks keparahan ternyata wilayah pedesaan cenderung mengalami tingkat kemiskinan

yang lebih parah daripekotaan. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDB dan Variabel jumlah pendudukberpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan alfa masing – masing 0,05dan 0,01.

Penelitian oleh Dhimas Anggara Willy Putra berjudul Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2009-2013. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan tahun 2009-2013.Menggunakan metode analisis panel data melalui pendekatan Random Effect Model (REM). Hasilnya terdapat pengaruh positif dan signifikan saat (uji F) antara PDRB, pengangguran terhadap kemiskinan dan saat (uji t) PDRB tidak berpengaruh signifikan, namun pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011 oleh Sri Kuncoro. Model analisis yang digunakan adalah panel data dengan pendekatan *Random Effect Model*(REM).Hasilnya yaitu pengangguran dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, kemudian pendidikanberkorelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Selanjutnya penelitian oleh Vighar Choirul Iqbalberjudul Analisis Pengaruh Performa Ekonomi Makro terhadap Kemiskinan di Jawa Timur, menggunakan Regresi data panel dengan model *Random Effect Model*(REM). Hasilnya laju pertumbuhan ekonomi dan TPT mempunyai pengaruh positif dan signifikan, kemudian variabel IPM mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

Penelitian oleh Anggit Yoga Permana berjudul Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yangmempengaruhi kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selamaperiode tahun 2004-2008. Salah satu pendekatan yangdigunakan untuk mengestimasi model regresi data panel adalah denganmenggunakan *fixed effect model* (FEM), yaitu dengan memasukan variabeldummy dalam persamaan,

atau disebut juga dengan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Hasilnya yaitu menunjukkan variabel PDRB, pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang selanjutnya oleh Whisnu Adhi Saputra dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Model regresi yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares Regression Analysis*) dengan menggunakan Panel Data dan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*). Hasilnya variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, kemudian pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Jawa Tengah.

Berikut disajikan tabel ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang sama, antara lain:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
1	Dita Wahyu Puspita (2015) Jurnal	Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Metode analisis regresi data panel model Random Effect - Generalized Least Square	Variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, kemudian variabel pengangguran positif terhadap kemiskinan dan variabel populasi atau jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
2	Sirilius Seran (2012) Jurnal	Determinan Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Kemiskinan Penduduk	Analisis jalur (<i>Path</i>) Pengembangan dari analisis regresi diolah dengan software SPSS versi 19.	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan (formal) membuat orang menjadi pintar, dan menguasai teknologi sehingga meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari mereka yang produktivitas rendah. Terdapat hubungan antara pendapatan dengan konsumsi dan kemiskinan.
3	Martiyani Ramdani (2015) Jurnal	Determinan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1982-2012	Analisis Deskriptif, dan analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS).	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Pengeluaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
4	Ach. Samsul Rizal (2013) Skripsi	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jember Tahun 1998-2012	Metode analisis Regresi Linear Berganda	Variabel PDRB dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember Tahun 1998-2012
5	Candra Mustika (2011) Jurnal	Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008.	Metode analisis kuantitatif yang menggunakan analisis Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel jumlah penduduk dan PDB masing-masing berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan masing-masing 0,05 dan 0,01. b. Untuk uji F, kedua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen pada alfa 0,01
6	Dhimas Anggara Willy Putra (2015) Skripsi	Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2009-2013	Regresi data panel dengan model <i>Random Effect Model</i> (REM)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan saat uji F antara PDRB, pengangguran terhadap kemiskinan b. Pada uji t, PDRB tidak berpengaruh signifikan, namun pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
7	Sri Kuncoro (2014) Jurnal	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011	Regresi data panel dengan model <i>Random Effect Model</i> (REM)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengangguran berkorelasi negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. b. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. c. Pendidikan berkorelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
8	Vighar Choirul Iqbal (2015) Skripsi	Analisis Pengaruh Performa Ekonomi Makro terhadap Kemiskinan di Jawa Timur	Regresi data panel dengan model <i>Random Effect Model</i> (REM)	<ul style="list-style-type: none"> a. Laju pertumbuhan ekonomi dan TPT mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. b. IPM mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.
9	Anggit Yoga Permana (2012) Skripsi	Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009	Regresi data panel dengan model <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	<ul style="list-style-type: none"> a. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. b. Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. c. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. d. Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
10	Whisnu Adhi Saputra (2011) Skripsi	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah	Regresi linier berganda(<i>Ordinary Least Squares</i>)dengan menggunakan Panel Data dan pendekatan efek tetap (<i>Fixed Effect Model</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. b. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. c. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. d. Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

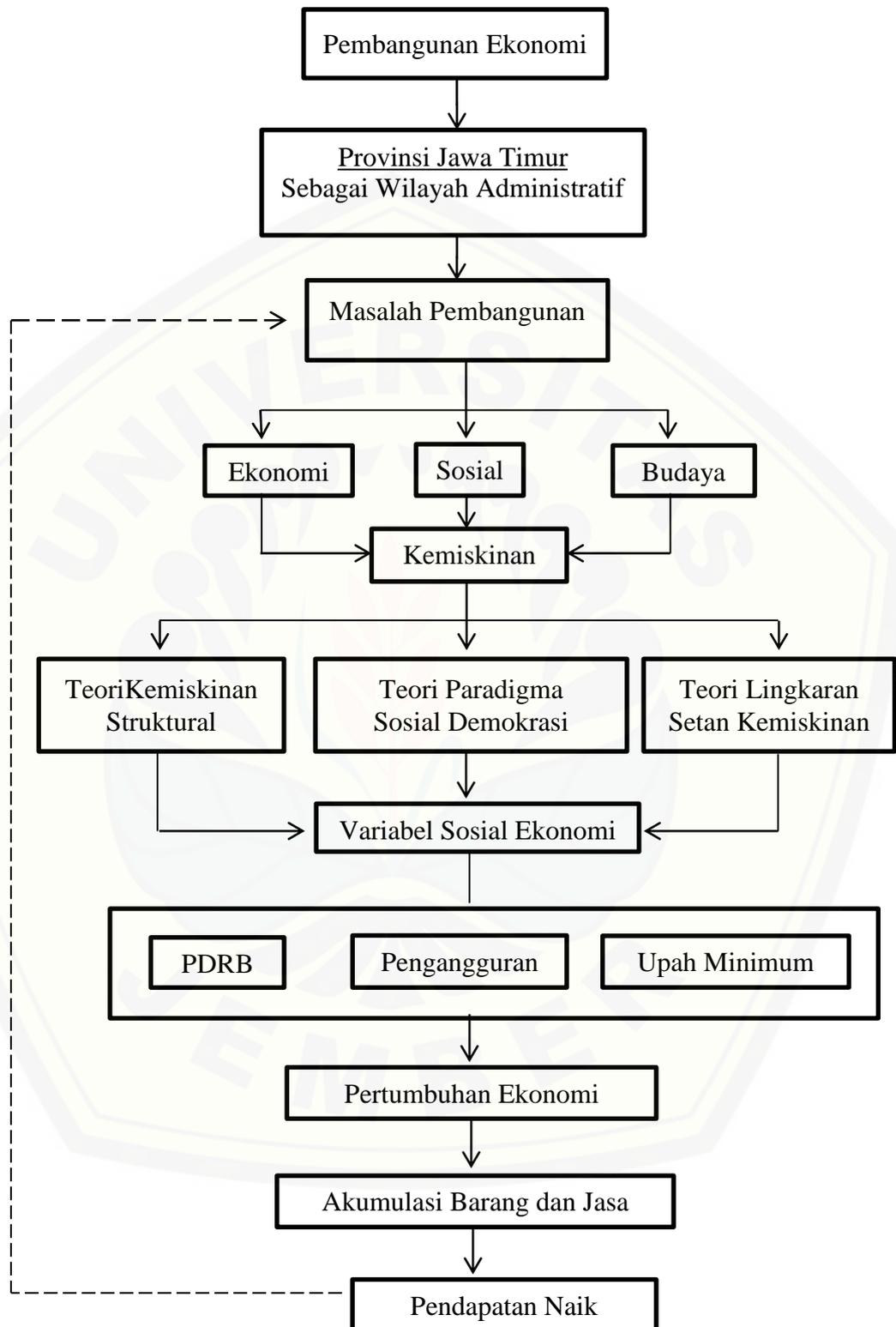
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Berdasarkan penjelasan teoritis dan penelitian terdahulu di atas, dijelaskan bahwa PDRB (X1) adalah indikator yang lazim digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Wahyu Puspita (2015) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara PDRB terhadap kemiskinan. Kenaikan PDRB akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut Sadono Sukirno (2004:297), efek buruk dari pengangguran (X2) adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Martiyan Ramdan menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengangguran terhadap kemiskinan. Semakin naik jumlah pengangguran, maka tingkat kemiskinan pun akan naik.

Upah minimum (X3) merupakan jumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi (Sukirno, 2010:24). Upah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja, adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran tenaga kerja, sesuai dengan hukum penawaran bahwa tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Kemudian jika tingkat upah relatif rendah, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan menjadi sedikit, menyebabkan banyak tenaga kerja menganggur, sehingga tingkat kemiskinan pun bertambah.

Dari uraian penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini dibangun suatu alur pemikiran dalam hubungannya antara PDRB, pengangguran dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Adapun bagan alur pemikiran yang dilandasi oleh kajian teoritis maupun penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah suatu usulan untuk memecahkan masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai tujuan penelitian.

3.1.1 Jenis Penelitian

Judul penelitian ini adalah Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *explanatory research*, yaitu jenis penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui (menguji) ada tidaknya hubungan, sifat hubungan dan besar hubungan antara dua variabel atau lebih (Singarimbun, 1989:18). Penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian yang dilakukan secara sengaja untuk masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini akan diuji bagaimana pola hubungan antara besarnya PDRB, pengangguran dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja makro ekonomi. Indikator ekonomi makro wilayah dalam kajian ini meliputi kemiskinan sebagai variabel terikat (*dependent variabel*), sedangkan PDRB, pengangguran dan upah minimum di Provinsi Jawa Timur sebagai variabel bebas (*independent variabel*) selama kurun waktu tahun 2010-2016.

3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2010-2016. Sedangkan tempat yang dijadikan objek penelitian adalah Provinsi Jawa Timur, dikarenakan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan angka kemiskinan absolut tertinggi.

3.1.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data dalam bentuk angka dimana data didapat dan diperoleh dengan cara mencatat dan menyalin data yang telah dikumpulkan/diterbitkan oleh instansi terkait dan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini (Santoso, 2004). Data sekunder yang digunakan berupa data berdasarkan deret waktu (*time series*) untuk melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi selama periode waktu tertentu. Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan penggabungan dari data *time series* dari tahun 2010-2016 dan data *cross section* dari 38 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Regresi Data Panel

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel PDRB, pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016, maka dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda (*multiple linear regression method*) dengan model data panel. Regresi data panel adalah regresi yang menggabungkan data *time series* dan *cross section* (Widarjono, 2009).

Menurut Gujarati (2015), adapun beberapa keuntungan dari data panel yaitu:

- a) Adanya batasan heterogenitas dalam unit tersebut.
- b) Gabungan antara *time series* dan *cross section* dapat memberikan informasi lengkap, lebih banyak variasi, sedikit kolineritas antar variabel, lebih banyak *degree of freedom*, dan lebih efisien.
- c) Observasi *cross section* yang berulang-ulang, data panel ini paling cocok untuk mengukur dinamika perubahan.

d) Data panel dapat meminimumkan bias jika kita mengagresi individu-individu atau perusahaan-perusahaan kedalam agresi besar.

Ada dua pendekatan mendasar yang digunakan dalam mengestimasi data panel *pertama*, pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *kedua* adalah pendekatan *Random Effect Model* (REM).

1. Uji Pemilihan Pendekatan Data Panel (*Hausman Test*)

Metode ekonometrika yang lazim digunakan untuk menganalisis apakah lebih tepat *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) untuk memecahkan sistem persamaan panel data adalah dengan Hausman-test. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variasi independen. Jika H_0 ditolak, nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Fixed Effect (Chi square hitung > Chi square tabel dan probabilitas hitung < $\alpha = 5\%$), sedangkan sebaliknya jika H_0 diterima pada saat nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah Random Effect (Chi square hitung < Chi square tabel dan probabilitas hitung > $\alpha = 5\%$) (Widarjono, 2013:365).

Hipotesis yang digunakan dalam uji Hausman ialah (Hapsoro, 2013):

$H_0 =$ *random effect* lebih baik daripada *fixed effect*

$H_1 =$ *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*

Uji nilai statistik Hausman signifikan apabila probabilitasnya kurang dari taraf nyata, sehingga H_0 ditolak yang artinya FEM lebih baik dari pada REM.

2. Pendekatan *Fixed Effect*

Teknik model *Fixed Effect* (FEM) adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar individu namun intersepanya sama antar waktu. Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar individu dan waktu (Widarjono, 2013:356-357). Model dengan fixed effect dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut :

$$Y = b_{1i} + b_2 X_{it} + b_3 X_3 + e$$

Untuk $i=1, \dots, N$ dan $t = 1, \dots, T$

Terjadi dua komponen error ε_{it} , yaitu mengandung tidak hanya efek individu dan random error tetapi juga karena efek waktu dan mengandung efek individu dan random.

3. Pendekatan *Random Effect*

Model Random Effect akan mengistemasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Nama metode Random Effect berasal dari pengertian bahwa variabel gangguan u_{it} terdiri dari dua komponen yaitu variabel gangguan secara menyeluruh e_{it} yaitu kombinasi time series dan cross section dan variabel gangguan antar individu e_{it} . Dalam hal ini, variabel gangguan μ_i adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu (Widarjono, 2013:360).

$$Y = b_{1i} + b_2 X_{it} + b_3 X_3 + e$$

Untuk $i=1, \dots, N$ dan $t = 1, \dots, T$

Dalam buku Ekonometrika Gujaratan dan Porter (2015: 250), nilai intersep β_{1i} tidak diasumsikan nilai tetap namun sebagai sebuah variabel acak dengan nilai rata-rata β_1 (tidak ada notasi i dilambang ini) nilai intersep individu dimodelkan:

$$B_{1i} = b_1 + \varepsilon_i$$

Dimana ε_i adalah error acak dengan nilai rata-rata nol dan varians σ^2

Perumusan model penelitian ini sesuai yang digunakan dalam model persamaan pada judul “Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016” tujuan analisis ini untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih. Secara Ekonometrika hubungan antara PDRB, pengangguran, dan upah minimum terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur regresi linear dalam penelitian ini dimana sebuah variabel terikat (Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (variabel X). Secara umum menggunakan persamaan yaitu:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kemiskinan

X₁ = PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

X₂ = Pengangguran

X₃ = Upah Minimum

b₀ = Kostanta

b₁, b₂, b₃, b₄ = Koefisien regresi masing-masing variabel

e = *Standart error*/ pengganggu

3.2.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan model yang sah secara teoritis, maka suatu proses harus memenuhi beberapa asumsi klasik. Hal ini diperlukan agar hasil yang diperoleh dapat konsisten dan efisien secara teori (Hapsoro, 2013). Ada empat uji asumsi klasik yang dilakukan terhadap suatu model regresi, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolerasi (Hapsoro, 2013) antara lain:

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila nilai R² yang dihasilkan dalam suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, hal ini merupakan salah satu indikasi terjadinya multikolinearitas (Imam Ghazali, 2006:91).

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi apabila terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel-variabel bebas sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antar variabel-variabel bebas itu secara individu terhadap variabel terikat. Multikolinieritas diduga terjadi jika nilai R² tinggi dan nilai t semua variabel penjelas tidak signifikan, serta nilai F tinggi. Akibatnya adanya multikolinieritas sempurna adalah koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai simpangan baku setiap koefisien

regresi menjadi tidak terhingga. Untuk mendeteksinya adalah dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terdapat multikolinieritas dalam model. Sebaliknya, jika koefisien korelasi rendah di bawah 0,85 maka model tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas (Widajono, 2013:104).

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:66). Dasar pengambilan keputusan yaitu:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan pengujian ekonometrika yang digunakan untuk menguji suatu model apakah antara variabel pengganggu bagi masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Uji autokorelasi adalah alat ekonometrika yang digunakan untuk menguji suatu model apabila kesalahan pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu pada periode lainnya. Untuk mengetahui apakah model regresi mengandung autokorelasi digunakan uji *Durbin-Watson* (Gujarati, 2000:215) :

Rumus hipotesis :

$H_0 : \rho = 0$, artinya antara variabel bebas yaitu PDRB, pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan tidak terdapat autokorelasi.

$H_a : \rho \neq 0$, artinya antara variabel bebas yaitu PDRB, pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan terdapat autokorelasi.

Kriteria pengujian :

1. Jika d_w, d_L atau $d_w > 4 - d_L$, maka H_0 ditolak, berarti ada autokorelasi positif maupun negatif
2. Jika $d_u < d_w < 4 - d_u$, maka H_0 diterima, berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika $d_u < d_w < d_u$ atau $4 - d_u < 4 - d_L$, maka tidak ada kesimpulan

Keterangan :

d_u = Durbin Watson tabel pada batas bawah

d_L = Durbin Watson tabel pada batas atas

4. Uji Normalitas

Kenormalan dalam variabel pengganggu dapat diamati dengan melakukan uji *Jarque-Berra* LM (Gujarati, 1995:143 dalam Wardono, 2004:61). Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain J-B Test dan metode grafik. Penelitian ini menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung nilai skewness dan kurtosis, apabila nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi normal dan bila probabilitasnya > 5 persen, maka data berdistribusi normal (Winarno, 2009 dalam Hapsoro 2013).

3.2.3 Uji Statistik

Selain beberapa pengujian di atas, dilakukan uji statistik untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Pengujian statistik melibatkan ukuran kesesuaian model yang digunakan (*goodness of fit*) dan uji signifikan, baik pengujian secara parsial (uji t) maupun secara simultan (uji F).

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang terdiri dari PDRB, pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk (X_1, X_2, X_3, X_4) berpengaruh secara bersama (*simultan*) terhadap variabel terikat yakni tingkat kemiskinan (Y). (Supranto, 1995:268).

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ (ada pengaruh)

Dengan menggunakan $\alpha=5\%$ maka pengujian hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 2004:120) :

- a. Bila f probabilitas $\leq \alpha$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh nyata antar variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Bila f probabilitas $> \alpha$, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata antar variabel bebas dengan variabel terikat.
- c. $F_{\text{tabel}} = \alpha (k-1, n-k)$, dimana n (jumlah sampel) dan k (banyaknya koefisien regresi dan konstanta)
- d. $F_{\text{hitung}} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$
- e. Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima H_1 ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

2. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independen) secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial.

$$t = \frac{b_i}{S(b_i)}$$

Keterangan:

t = pengujian secara parsial

b_i = besarnya perubahan dari variabel bebas

$S(b_i)$ = standart error atau taksiran kesalahan

Rumus Hipotesisnya:

1. $H_0: b_i = 0$ Artinya dimana secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen
2. $H_a : b \neq 0$ Artinya dimana secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Hal ini menjelaskan bahwa variasi variabel terikat, apabila t hitung lebih kecil dari pada t tabel dan $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dapat disimpulkan bahwa

variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika t hitung lebih besar dari pada t tabel dan $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima sehingga berpengaruh positif signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji R^2 (Koefisien Determinasi Berganda)

Koefisien ini digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas X_1, X_2, X_3 , dan X_4 terhadap naik dan turunnya variabel terikat Y dengan batas $R^2 < R^2 < 1$ (Supranto, 1995:206).

Kriteria Pengujian:

- Apabila nilai R^2 hampir mendekati 1, maka kontribusi PDRB dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur besar;
- Apabila nilai R^2 hampir mendekati 0, maka kontribusi PDRB dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur kecil.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan pengertian terhadap istilah dalam pengertian agar menyamakan pandangan penulis dan pembaca. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (*dependent variabel*) dan empat variabel bebas (*independent variabel*). Adapun yang termasuk variabel terikat adalah kemiskinan, dan yang termasuk variabel bebas adalah PDRB, pengangguran, upah minimum, dan jumlah penduduk.

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin yang memiliki ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. Data kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk miskin di 38 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang tersaji dalam bentuk ratusan ribu jiwa.

2. Produk Domestik Regional Bruto (X1)

Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas harga konstan, dinyatakan dalam jutaan rupiah. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3. Pengangguran (X2)

Merupakan kondisi di mana seseorang yang masuk kategori usia produktif yaitu 15-64 tahun, namun tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data pengangguran tahun 2010-2016. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang tersaji dalam bentuk ribuan jiwa.

4. Upah Minimum (X3)

Upah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku pada suatu daerah dimana penetapan upah minimum ini berdasarkan standar hidup yang terdapat pada masing-masing daerahnya, menunjukkan standar minimum pemberian upah pada pekerja. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data upah minimum kota/kabupaten (UMK) di provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 dalam jutaan rupiah.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan makadapatdisimpulkan sebagai berikut:

1. Setiap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan sebesar satu juta rupiah, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur akan bertambah sebesar 6.766 jiwa.
2. Setiap jumlah pengangguran mengalami peningkatan sebesar seribu jiwa, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timurkan bertambah sebesar 3.854 jiwa.
3. Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, sehingga ketika terjadi peningkatan atau pengurangan upah minimum maka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang diberikan antara lain:

1. Dari hasil penelitian, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Dengan hasil tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan pemeratakan hasil dari pertumbuhan ekonomi, agar dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat baik kaya maupun miskin. Pemerataan ini dapat dimulai dengan cara membangun infrastruktur terutama di daerah pedesaan. Dengan meratanya hasil pertumbuhan ekonomi, masyarakat desa mampu menikmati dan memanfaatkan fasilitas yang ada di desa. Penggunaan fasilitas tersebut tentu dapat mempermudah kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal ini akan menyebabkan akumulasi barang dan jasa naik. Peningkatan akumulasi barang dan jasa ini akan menyebabkan pendapatan masyarakatpun naik, sehingga dapat mencukupi segala kebutuhannya. Hal ini

nantinya akan menyelesaikan masalah pembangunan yaitu salah satunya adalah masalah kemiskinan.

2. Dari hasil penelitian, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Pemerintah masih perlu memperluas sektor informal seperti mengembangkan industri rumah tangga. Pemerintah daerah juga harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pencarian atau kesempatan kerja di daerahnya masing-masing agar terjadi penurunan tingkat kemiskinan misalnya dengan memberikan pinjaman lunak tanpa agunan untuk modal kerja usaha kecil.
3. Dari hasil penelitian, upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Diharapkan penetapan upah minimum memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penetapan upah minimum harus mendekati KHM (Kebutuhan Hidup Minimum), karena setidaknya dengan penetapan upah tersebut, akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan minimumnya. Pemenuhan kebutuhan ini dapat meningkatkan kesejahteraan yang nantinya dapat mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Timur 2015*. Bappenas Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto*. BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Tingkat Pengangguran Terbuka*. BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Upah Minimum Provinsi*. BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Jumlah Penduduk*. BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Jumlah Penduduk Miskin*. BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa*. BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. *Profil pembangunan Jawa timur*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Boediono. 2002. *Ekonomi Mikro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1, Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Cholili, Fatkhul Mufid. 2014. *Analisis Pengaruh Pengangguran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)*. Jurusan Ekonomi dan Bisnis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Febriana, Enny. 2010. *Strategi untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin di Perdesaan: Studi Kasus dalam Rumah Tangga Petani Miskin di Desa Cisaat Kecamatan Cicurung Kabupaten Sukabumi*. Universitas Indonesia.
- Friedmann, John (1979), *Urban Poverty in Latin America, Some Theoretical Considerations*, dimuat dalam: *Development Dialogue*, Vol.1, Upsala, Dag Hammarskjold Foundation.

- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariant dengan SPSS, Edisi 4*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati.Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Edisi 4. Jakarta : PT.Erlangga.
- Gujarati.Damodar. 2000. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan : Sumarno Zain. Jakarta : PT.Erlangga.
- Gujarati.Damodar. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta : PT.Erlangga.
- Hapsoro, Dody Nurstyo Y. 2013. *Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus 4 Kota di Indonesia Tahun 2007-2010)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hartono, et al. 2017. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan PDRB terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*
- Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iqbal, Vighar Choirul. 2015. *Analisis Pengaruh Performa Ekonomi Makro terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*. Universitas Jember : Jember.
- Jhingan. M. L. 1994. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan-Ed.1 Cet.5*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kumalasari, Merna. 2011. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika Pembangunan*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Kuncoro, Sri. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011*.
- Latan, Hengky. 2013. *Analisis Multivariat Teknik dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.

- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Principles of Economics, Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustika, Candra. 2011. *Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008*. Universitas Jambi.
- Permana, Anggit Yoga. 2012. *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Puspita, Dita Wahyu. 2015. *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Negeri Semarang.
- Putra, Dhimas Anggara Willy. 2015. *Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2013*. Universitas Jember : Jember.
- Ramdani, Martiyan. 2015. *Determinan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1982-2012*. Universitas Negeri Semarang.
- Rizal, Achmad Samsul. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jember Tahun 1998-2012*. Universitas Jember : Jember.
- Santoso, Slamet. 2004. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saputra, Whisnu Adhi. 2011. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro: Semarang
- Seran, Sirilius. 2012. *Determinan Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Kemiskinan Penduduk*. Universitas Timor.
- Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Bima Grafika
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Makro Ekonomi, edisi kedua*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sony. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supranto, J. 1995. *Ekonometrik*. LPFE UI. Jakarta.
- Suryawati, Chriswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tarigan,R.2007. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P., dan Smith, Stephen C. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Viphindartin S, Herman Cahyo. 2016. Analysis of Economic Perfomance As The Independence Indicators of Government in East Java Province. *Society of Interdiscilinary Business Research*. Jember; Universitas Jember.
- Wahyudi,M.S. 2010. *Pengaruh Produk Domestic Bruto Dan Pembangunan Manusia Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widyawati, Wari Nila. 2017. *Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin Se-Karesidenan Madiun Tahun 2004-2010*. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Wiguna, Van Indra, 2013, *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan d Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Wijayanto, Ravi Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Wongdesmiwati. 2009. *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika*.

Lampiran A: Tabel Data Jumlah Penduduk Miskin (Y), PDRB (X1), Pengangguran (X2) dan Upah Minimum (X3)

Tahun	Kota/Kabupaten	Y (Ribuan)	X1 (Juta)	X2 (Ribuan)	X3 (Juta)
2010	Kota Surabaya	195,7	231204.70	91,4	1.031.500
2011	Kota Surabaya	183,3	247686.60	75,9	1.115.000
2012	Kota Surabaya	175,1	265892.10	72	1.257.000
2013	Kota Surabaya	168,7	286050.70	77,9	1.740.000
2014	Kota Surabaya	164,4	305947.60	85,3	2.200.000
2015	Kota Surabaya	165,72	324215.20	102,9	2.710.000
2016	Kota Surabaya	161,01	343652.60	86	3.045.000
2010	Kota Batu	9,7	6504.40	5,4	989.000
2011	Kota Batu	9,1	6968	4,5	1.050.000
2012	Kota Batu	8,7	7473.60	3,5	1.100.200
2013	Kota Batu	9,3	8018.60	2,4	1.268.000
2014	Kota Batu	9,1	8572.10	2,6	1.580.000
2015	Kota Batu	9,43	9145.90	4,5	1.877.000
2016	Kota Batu	9,05	9750.90	4,7	2.026.000
2010	Kota Blitar	10,1	2855	4,4	663.000
2011	Kota Blitar	9,5	3038.40	2,8	737.000
2012	Kota Blitar	9,1	3236.60	2,3	815.000
2013	Kota Blitar	10,1	3446.80	4,2	924.800
2014	Kota Blitar	9,8	3649.60	4	1.000.000
2015	Kota Blitar	10,04	3856.90	2,9	1.243.200
2016	Kota Blitar	9,97	4079.30	2,6	1.394.000
2010	Kota Kediri	24,9	57550.60	9,9	906.000
2011	Kota Kediri	23,3	60020.10	6,9	975.000
2012	Kota Kediri	22,3	63185.10	10,9	1.037.500
2013	Kota Kediri	22,7	65408.80	10,9	1.128.400
2014	Kota Kediri	22,1	69232.90	11,1	1.165.000
2015	Kota Kediri	23,77	72945.50	12,1	1.339.700
2016	Kota Kediri	23,64	76959.40	11,7	1.494.000
2010	Kota Madiun	10,4	6081.20	8,3	685.000
2011	Kota Madiun	9,7	6494.40	4,6	745.000
2012	Kota Madiun	9,3	6937.70	5,6	812.500
2013	Kota Madiun	8,7	7470.70	5,9	953.000
2014	Kota Madiun	8,5	7965.30	6	1.066.000
2015	Kota Madiun	8,55	8455.40	4,6	1.250.000
2016	Kota Madiun	9,05	8954.70	5,6	1.394.000
2010	Kota Malang	48,5	31377.30	34,1	1.006.200
2011	Kota Malang	45,4	33273.70	22,2	1.079.800

Tahun	Kota/Kabupaten	Y (Ribuan)	X1 (Juta)	X2 (Ribuan)	X3 (Juta)
2012	Kota Malang	43,4	35355.70	31,8	1.132.200
2013	Kota Malang	40,9	37547.70	33,3	1.340.300
2014	Kota Malang	40,6	39724.70	30,6	1.587.000
2015	Kota Malang	39,1	41952.10	29,7	1.882.200
2016	Kota Malang	37,03	44303.90	30,16	2.099.000
2010	Kota Mojokerto	8,9	2987.20	4,6	805.000
2011	Kota Mojokerto	8,3	3165.60	3,7	835.000
2012	Kota Mojokerto	7,9	3358.40	4,7	875.000
2013	Kota Mojokerto	8,2	3566.70	3,7	1.040.000
2014	Kota Mojokerto	8	3774.60	2,9	1.250.000
2015	Kota Mojokerto	7,72	3991.40	3,3	1.437.500
2016	Kota Mojokerto	7,24	4221.50	3,2	1.603.000
2010	Kota Pasuruan	16,8	3585.40	6	865.000
2011	Kota Pasuruan	15,7	3810.70	4,6	926.000
2012	Kota Pasuruan	15	4051.20	4,1	975.000
2013	Kota Pasuruan	14,6	4315.10	5,2	1.195.800
2014	Kota Pasuruan	14,2	4561.30	5,9	1.360.000
2015	Kota Pasuruan	14,52	4813.30	5,4	1.575.000
2016	Kota Pasuruan	14,93	5076.40	5,2	1.757.000
2010	Kota Probolinggo	41,4	4921.30	5,4	741.000
2011	Kota Probolinggo	38,8	5213.90	4,6	810.500
2012	Kota Probolinggo	40,8	5552.10	5,6	885.000
2013	Kota Probolinggo	39	5911.30	4,7	1.103.200
2014	Kota Probolinggo	19	6261.90	5,8	1.250.000
2015	Kota Probolinggo	18,66	6628.80	4,4	1.437.500
2016	Kota Probolinggo	18,37	7018.30	4,9	1.603.000
2010	Kab. Bangkalan	255,6	15881.40	32,4	755.000
2011	Kab. Bangkalan	239,5	16406.50	30,4	850.000
2012	Kab. Bangkalan	229	16173.70	29,6	885.000
2013	Kab. Bangkalan	217,4	16204	40,6	983.000
2014	Kab. Bangkalan	212,2	17369.20	60,3	1.102.000
2015	Kab. Bangkalan	216,23	16906.80	22,8	1.267.300
2016	Kab. Bangkalan	205,71	17018.60	36,5	1.414.000
2010	Kab. Banyuwangi	175,1	32463.80	13,3	824.000
2011	Kab. Banyuwangi	164	34720.40	21,3	865.000
2012	Kab. Banyuwangi	156,6	37235.70	18	915.000
2013	Kab. Banyuwangi	151,6	39733.60	23	1.086.400
2014	Kab. Banyuwangi	147,7	42005.70	18,7	1.240.000
2015	Kab. Banyuwangi	146	44529.90	16,6	1.426.000

Tahun	Kota/Kabupaten	Y (Ribuan)	X1 (Juta)	X2 (Ribuan)	X3 (Juta)
2016	Kab. Banyuwangi	140,45	46924.60	20,4	1.599.000
2010	Kab. Blitar	135,5	16213.90	20,7	655.000
2011	Kab. Blitar	126,9	17093.90	27,7	750.000
2012	Kab. Blitar	121,2	18054.50	22,8	820.000
2013	Kab. Blitar	119,8	18967.30	39,9	946.800
2014	Kab. Blitar	116,7	19920.20	20,2	1.000.000
2015	Kab. Blitar	114,12	20925.50	32,1	1.260.000
2016	Kab. Blitar	113,51	21991.40	30,4	1.405.000
2010	Kab. Bojonegoro	227,2	33291.90	45,2	825.000
2011	Kab. Bojonegoro	212,9	36751	26,7	870.000
2012	Kab. Bojonegoro	203,3	38136.10	37,5	930.000
2013	Kab. Bojonegoro	196	39039.40	27,6	1.023.500
2014	Kab. Bojonegoro	190,9	39934.80	30	1.140.000
2015	Kab. Bojonegoro	193,99	46892.80	34,7	1.311.000
2016	Kab. Bojonegoro	180,99	57187.40	29,1	1.462.000
2010	Kab. Bondowoso	131,9	8515.90	31,5	668.000
2011	Kab. Bondowoso	123,6	9033	47,7	735.000
2012	Kab. Bondowoso	118,1	9583.40	44,1	800.000
2013	Kab. Bondowoso	114,8	10140.10	45,6	946.000
2014	Kab. Bondowoso	111,9	10652.40	53,7	1.105.000
2015	Kab. Bondowoso	113,72	11179.60	56	1.270.700
2016	Kab. Bondowoso	114,63	11735.60	57,9	1.417.000
2010	Kab. Gresik	193,9	59068.60	32,2	1.010.400
2011	Kab. Gresik	181,7	62898.70	26,3	1.130.000
2012	Kab. Gresik	173,8	67248.80	40,3	1.257.000
2013	Kab. Gresik	170,9	71314.20	32,8	1.740.000
2014	Kab. Gresik	166,9	76336	26,5	2.195.000
2015	Kab. Gresik	170,76	81360.40	39,6	2.707.500
2016	Kab. Gresik	167,12	85835.10	34,2	3.042.500
2010	Kab. Jember	311,8	33375.50	28,6	830.000
2011	Kab. Jember	292,1	35208.20	35,9	875.000
2012	Kab. Jember	279	37262	32,9	920.000
2013	Kab. Jember	277,4	39519.20	36,6	1.091.900
2014	Kab. Jember	270,4	41971.70	38,6	1.270.000
2015	Kab. Jember	269,54	44222.60	40,2	1.460.500
2016	Kab. Jember	265,1	46526.60	40,7	1.629.000
2010	Kab. Jombang	166,5	17350.80	21,6	790.000
2011	Kab. Jombang	156	18385	28	866.500
2012	Kab. Jombang	149,1	19514.80	30,8	978.200

Tahun	Kota/Kabupaten	Y (Ribuan)	X1 (Juta)	X2 (Ribuan)	X3 (Juta)
2013	Kab. Jombang	137	20672.30	31,7	1.200.000
2014	Kab. Jombang	133,5	21793.20	26,3	1.500.000
2015	Kab. Jombang	133,75	22960.20	26	1.725.000
2016	Kab. Jombang	133,32	24199.10	29,8	1.924.000
2010	Kab. Kediri	232,8	18254.50	15,4	837.000
2011	Kab. Kediri	218,1	19354.90	14,4	934.500
2012	Kab. Kediri	208,3	20538.30	24,5	999.000
2013	Kab. Kediri	201,9	21733.50	10,4	1.089.500
2014	Kab. Kediri	196,8	22890	14,6	1.135.000
2015	Kab. Kediri	199,38	24007.70	13,8	1.305.200
2016	Kab. Kediri	197,43	25211.90	16,8	1.494.000
2010	Kab. Lamongan	220,6	16275.20	19,3	875.000
2011	Kab. Lamongan	206,7	17360.50	12,1	900.000
2012	Kab. Lamongan	197,2	18562.70	15	950.000
2013	Kab. Lamongan	191,3	19848.80	16,9	1.075.700
2014	Kab. Lamongan	186,1	21099.90	12,3	1.220.000
2015	Kab. Lamongan	182,64	22316.90	24,6	1.410.000
2016	Kab. Lamongan	176,92	23623.80	16,7	1.573.000
2010	Kab. Lumajang	140,8	14260.10	9,2	688.000
2011	Kab. Lumajang	131,9	15144.40	10,5	740.700
2012	Kab. Lumajang	126	16053.40	13,6	825.400
2013	Kab. Lumajang	123,9	16949.60	10,5	1.011.900
2014	Kab. Lumajang	120,7	17851.90	14,7	1.120.000
2015	Kab. Lumajang	118,51	18676.90	21,3	1.288.000
2016	Kab. Lumajang	115,91	19555.20	17,4	1.437.000
2010	Kab. Madiun	102,3	8119.70	56,4	660.000
2011	Kab. Madiun	95,8	8608.70	60	720.000
2012	Kab. Madiun	91,5	9135.70	49,5	775.000
2013	Kab. Madiun	83,4	9654.10	67,1	960.700
2014	Kab. Madiun	81,2	10169.70	62,6	1.045.000
2015	Kab. Madiun	84,74	10704.90	64	1.196.000
2016	Kab. Madiun	85,97	11268.90	63	1.394.000
2010	Kab. Magetan	80,3	8277.80	26,4	650.000
2011	Kab. Magetan	75	8744.80	23,4	705.000
2012	Kab. Magetan	71,6	9251.20	18,7	750.000
2013	Kab. Magetan	76	9792.60	16,9	866.200
2014	Kab. Magetan	74	10291.70	21,1	1.000.000
2015	Kab. Magetan	71,16	10823.90	23,3	1.150.000
2016	Kab. Magetan	69,24	11398.10	19,2	1.283.000

Tahun	Kota/Kabupaten	Y (Ribu)	X1 (Juta)	X2 (Ribu)	X3 (Juta)
2010	Kab. Malang	306,8	41342.90	18,4	1.000.000
2011	Kab. Malang	287,4	44091.30	25,7	1.077.600
2012	Kab. Malang	274,6	47076	22,1	1.130.500
2013	Kab. Malang	287,4	49571.70	25,7	1.343.700
2014	Kab. Malang	280,3	52550.40	21	1.635.000
2015	Kab. Malang	292,87	55317.80	10,8	1.882.200
2016	Kab. Malang	293,74	58247.30	17,4	2.188.000
2010	Kab. Mojokerto	125,4	34147.10	21,5	1.009.100
2011	Kab. Mojokerto	117,5	36405.80	18,2	1.105.000
2012	Kab. Mojokerto	112,3	39047.30	12,7	1.234.000
2013	Kab. Mojokerto	116,1	41608.40	23,5	1.700.000
2014	Kab. Mojokerto	113,3	44292	21	2.050.000
2015	Kab. Mojokerto	113,86	46792.30	10,9	2.695.000
2016	Kab. Mojokerto	115,38	49321.90	14,8	3.030.000
2010	Kab. Nganjuk	151,7	11405.40	3	650.000
2011	Kab. Nganjuk	142,1	12061.20	7,9	710.000
2012	Kab. Nganjuk	135,7	12767	3,9	785.000
2013	Kab. Nganjuk	140,2	13456	3,4	960.200
2014	Kab. Nganjuk	136,5	14142.90	3,8	1.131.000
2015	Kab. Nganjuk	132,04	14875.40	3,4	1.265.000
2016	Kab. Nganjuk	127,9	15661.80	3,7	1.411.000
2010	Kab. Ngawi	149,2	8456.70	15,5	650.000
2011	Kab. Ngawi	137,8	8973.30	11,6	710.000
2012	Kab. Ngawi	131,2	9568.20	10,5	785.000
2013	Kab. Ngawi	127	10094	10,4	960.200
2014	Kab. Ngawi	123,2	10681	10	1.131.000
2015	Kab. Ngawi	129,32	11223.10	18,9	1.265.000
2016	Kab. Ngawi	126,65	11807.60	20,4	1.411.000
2010	Kab. Pacitan	105,4	6817.40	27,7	630.000
2011	Kab. Pacitan	98,7	7246.20	38,5	705.000
2012	Kab. Pacitan	94,1	7705	51,7	750.000
2013	Kab. Pacitan	91,3	8157.60	35,7	887.200
2014	Kab. Pacitan	88,9	8582.20	37,4	1.000.000
2015	Kab. Pacitan	92,08	9019.50	52,3	1.150.000
2016	Kab. Pacitan	85,53	9489.10	48,7	1.283.000
2010	Kab. Pamekasan	179,2	6994.20	18,9	900.000
2011	Kab. Pamekasan	167,9	7429.40	20,6	925.000
2012	Kab. Pamekasan	160,3	7894	16,1	975.000
2013	Kab. Pamekasan	153,1	8375.20	15,8	1.059.600

Tahun	Kota/Kabupaten	Y (Ribu)	X1 (Juta)	X2 (Ribu)	X3 (Juta)
2014	Kab. Pamekasan	148,8	8846.20	18,2	1.090.000
2015	Kab. Pamekasan	146,92	9316.90	17,9	1.201.700
2016	Kab. Pamekasan	142,32	9815.80	16,8	1.350.000
2010	Kab. Pasuruan	199,3	61178.30	12,2	1.005.000
2011	Kab. Pasuruan	186,7	65271.60	18,2	1.170.000
2012	Kab. Pasuruan	178,5	70167.10	12,4	1.252.000
2013	Kab. Pasuruan	175	75044	20,2	1.720.000
2014	Kab. Pasuruan	170,7	80105.40	8,8	2.190.000
2015	Kab. Pasuruan	169,19	84415.70	15,1	2.700.000
2016	Kab. Pasuruan	168,06	89011.20	13,7	3.037.500
2010	Kab. Ponorogo	113	8961.50	83,6	635.000
2011	Kab. Ponorogo	105,9	9472.20	48,4	705.000
2012	Kab. Ponorogo	101,1	10038.40	50,8	745.000
2013	Kab. Ponorogo	102,6	10554.50	42,4	924.000
2014	Kab. Ponorogo	99,9	11104.50	41,5	1.000.000
2015	Kab. Ponorogo	103,22	11687.90	68,3	1.150.000
2016	Kab. Ponorogo	102,06	12305.70	44,9	1.283.000
2010	Kab. Probolinggo	276,7	15028.10	11,3	744.000
2011	Kab. Probolinggo	259,2	15912.50	21,2	814.000
2012	Kab. Probolinggo	247,6	16936.80	7,5	888.500
2013	Kab. Probolinggo	237,8	17808.90	15,8	1.198.600
2014	Kab. Probolinggo	231,9	18682.20	6,3	1.353.700
2015	Kab. Probolinggo	236,96	19571	12,3	1.556.800
2016	Kab. Probolinggo	240,47	20504.10	9,8	1.736.000
2010	Kab. Sampang	285,5	10064	8,3	690.000
2011	Kab. Sampang	267,5	10315.30	11,6	725.000
2012	Kab. Sampang	252,6	10910.90	12,8	800.000
2013	Kab. Sampang	247,2	11623.80	16,8	1.104.600
2014	Kab. Sampang	239,6	11632.90	16,8	1.120.000
2015	Kab. Sampang	240,35	11874.50	10	1.231.600
2016	Kab. Sampang	227,8	12606.80	15,3	1.387.000
2010	Kab. Sidoarjo	145,5	81472.70	17,1	1.005.000
2011	Kab. Sidoarjo	136,3	87212.40	25,1	1.107.000
2012	Kab. Sidoarjo	130	93543.90	24,4	1.252.000
2013	Kab. Sidoarjo	137,6	99992.50	26,3	1.720.000
2014	Kab. Sidoarjo	133,8	106434.30	20,6	2.190.000
2015	Kab. Sidoarjo	136,13	112012.90	18,3	2.705.000
2016	Kab. Sidoarjo	136,79	118179.20	22,6	3.040.000
2010	Kab. Situbondo	105,2	8471.40	19	660.000

Tahun	Kota/Kabupaten	Y (Ribu)	X1 (Juta)	X2 (Ribu)	X3 (Juta)
2011	Kab. Situbondo	98,6	8927.10	18,5	737.000
2012	Kab. Situbondo	94,1	9411.60	17,3	802.500
2013	Kab. Situbondo	90	9993.80	14,9	1.048.000
2014	Kab. Situbondo	87,7	10572.40	13,7	1.071.000
2015	Kab. Situbondo	91,17	11086.50	21,6	1.209.900
2016	Kab. Situbondo	89,68	11640.80	16,4	1.374.000
2010	Kab. Sumenep	256,7	15136.50	25	730.000
2011	Kab. Sumenep	242,5	16064.80	16,9	785.000
2012	Kab. Sumenep	231,4	17665	24,2	825.000
2013	Kab. Sumenep	224,6	20218.10	31,9	965.000
2014	Kab. Sumenep	218,9	21476.90	26,9	1.090.000
2015	Kab. Sumenep	216,84	21750.60	24,1	1.253.500
2016	Kab. Sumenep	216,14	22311.70	26,8	1.398.000
2010	Kab. Trenggalek	108	7962.10	6,4	635.000
2011	Kab. Trenggalek	101,2	8435.20	11,2	710.000
2012	Kab. Trenggalek	96,6	8959.50	15,1	760.000
2013	Kab. Trenggalek	92,4	9496.70	7,9	903.900
2014	Kab. Trenggalek	90	9998.50	15,5	1.000.000
2015	Kab. Trenggalek	92,17	10501.60	7,4	1.150.000
2016	Kab. Trenggalek	91,49	11026.50	11,6	1.283.000
2010	Kab. Tuban	225,8	28017.90	7,9	870.000
2011	Kab. Tuban	211,5	29934.30	16,5	935.000
2012	Kab. Tuban	202	31816.30	8,5	970.000
2013	Kab. Tuban	196,1	33678.80	21,8	1.144.400
2014	Kab. Tuban	191,1	35519.90	11,3	1.370.000
2015	Kab. Tuban	196,59	37256	11,5	1.575.500
2016	Kab. Tuban	198,35	39081.80	14,3	1.757.000
2010	Kab. Tulungagung	105,4	16776.30	11,3	641.000
2011	Kab. Tulungagung	98,7	17845.20	16,8	720.000
2012	Kab. Tulungagung	94,3	18999	11,6	815.000
2013	Kab. Tulungagung	91,3	20164.30	10,7	1.007.900
2014	Kab. Tulungagung	89	21265.20	14,5	1.107.000
2015	Kab. Tulungagung	87,37	22326.60	13	1.237.000
2016	Kab. Tulungagung	84,35	23446.40	3,1	1.420.000

Lampiran B : Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	401.534079	(37,225)	0.0000
Cross-section Chi-square	1118.567507	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/25/18 Time: 20:26

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	152747.6	2977.449	51.30149	0.0000
X1	-4.57E-11	9.81E-11	-0.465530	0.6420
X2	-0.160547	0.099100	-1.620058	0.1066
X3	-0.013779	0.001921	-7.174337	0.0000

R-squared	0.374147	Mean dependent var	131327.2
Adjusted R-squared	0.366981	S.D. dependent var	79450.31
S.E. of regression	63212.67	Akaike info criterion	24.96132
Sum squared resid	1.05E+12	Schwarz criterion	25.01521
Log likelihood	-3315.856	Hannan-Quinn criter.	24.98297
F-statistic	52.20951	Durbin-Watson stat	0.239084
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran C : Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	33.828413	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.000000	0.000000	0.000000	0.0402
X2	-0.160547	-0.085534	0.000187	0.0000
X3	-0.013779	-0.014878	0.000000	0.0338

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/25/18 Time: 20:33

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	87739.08	11481.14	7.642015	0.0000
X1	-6.76E-10	1.31E-10	-5.149173	0.0000
X2	3.854199	0.329650	11.69178	0.0000
X3	-0.017658	0.009401	-1.878355	0.0614

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990663	Mean dependent var	131327.2
Adjusted R-squared	0.989003	S.D. dependent var	79450.31
S.E. of regression	8331.606	Akaike info criterion	21.03437
Sum squared resid	1.56E+10	Schwarz criterion	21.58672
Log likelihood	-2756.572	Hannan-Quinn criter.	21.25627
F-statistic	596.8230	Durbin-Watson stat	0.691260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran D : Estimasi *Fixed Effect*

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/25/18 Time: 20:37

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

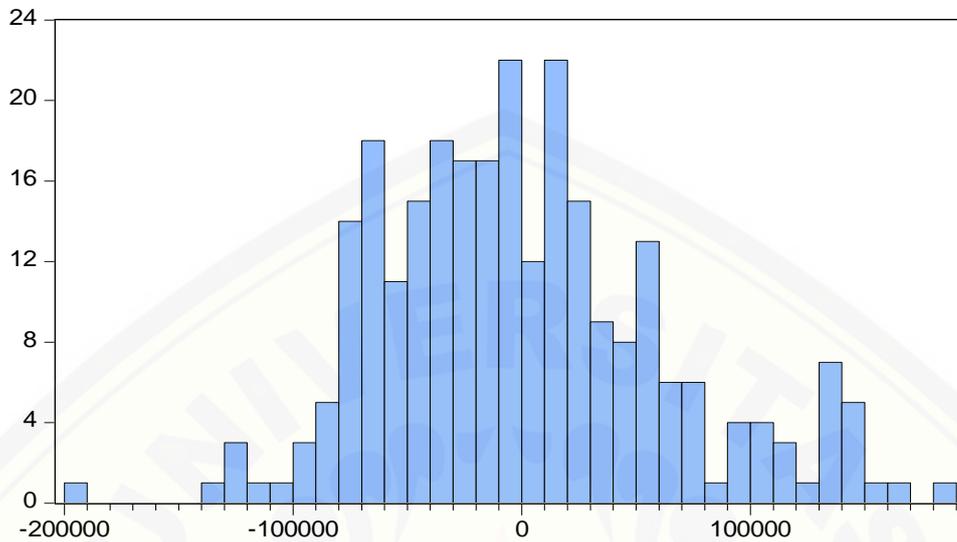
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	87739.08	11481.14	7.642015	0.0000
X1	-6.76E-10	1.31E-10	-5.149173	0.0000
X2	3.854199	0.329650	11.69178	0.0000
X3	-0.017658	0.009401	-1.878355	0.0614

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990663	Mean dependent var	131327.2
Adjusted R-squared	0.989003	S.D. dependent var	79450.31
S.E. of regression	8331.606	Akaike info criterion	21.03437
Sum squared resid	1.56E+10	Schwarz criterion	21.58672
Log likelihood	-2756.572	Hannan-Quinn criter.	21.25627
F-statistic	596.8230	Durbin-Watson stat	0.691260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran E: Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2016
Observations 266

Mean	-1.54e-11
Median	-4794.793
Maximum	186298.5
Minimum	-191641.6
Std. Dev.	62853.84
Skewness	0.492382
Kurtosis	3.229783
Jarque-Bera	11.33338
Probability	0.003459

Lampiran F: Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.760170	0.497446
X2	0.760170	1.000000	0.400689
X3	0.497446	0.400689	1.000000

Lampiran G : Uji Autokorelasi

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/25/18 Time: 20:37

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	87739.08	11481.14	7.642015	0.0000
X1	-6.76E-10	1.31E-10	-5.149173	0.0000
X2	3.854199	0.329650	11.69178	0.0000
X3	-0.017658	0.009401	-1.878355	0.0614

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990663	Mean dependent var	131327.2
Adjusted R-squared	0.989003	S.D. dependent var	79450.31
S.E. of regression	8331.606	Akaike info criterion	21.03437
Sum squared resid	1.56E+10	Schwarz criterion	21.58672
Log likelihood	-2756.572	Hannan-Quinn criter.	21.25627
F-statistic	596.8230	Durbin-Watson stat	0.691260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran H : Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: REABS

Method: Panel Least Squares

Date: 03/25/18 Time: 20:53

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55977.80	7063.053	7.925440	0.0000
X1	-1.56E-11	8.07E-11	-0.192933	0.8472
X2	-0.261387	0.202797	-1.288910	0.1986
X3	-0.000417	0.005783	-0.072036	0.9426
R-squared	0.019287	Mean dependent var		49162.52
Adjusted R-squared	0.008058	S.D. dependent var		39045.25
S.E. of regression	38887.62	Akaike info criterion		23.98966
Sum squared resid	3.96E+11	Schwarz criterion		24.04355
Log likelihood	-3186.625	Hannan-Quinn criter.		24.01131
F-statistic	1.717566	Durbin-Watson stat		0.483396
Prob(F-statistic)	0.163750			